

PRODUKSI SAPI DALAM NEGERI DAN KEBIJAKAN SWASEMBADA SAPI

Juli Panglima Saragih*

11

Abstrak

Indonesia hampir setiap tahun mengimpor baik daging sapi maupun sapi hidup untuk penggemukan dan pengembangbiakan. Hal ini dilakukan karena kebutuhan daging sapi yang terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada hari-hari besar. Sedangkan program swasembada sapi selalu gagal sejak lama. Tulisan ini menganalisis persoalan produksi sapi dan kebijakan program swasembada sapi. Impor daging sapi sudah tidak dapat dielakkan, tetapi strategi lain yang harus ditempuh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian adalah menata ulang kebijakan swasembada sapi dalam negeri agar secara perlahan populasi sapi domestik bertambah. Terkait hal ini DPR RI melalui Komisi IV dan VI perlu mendesak pemerintah mencari solusi guna mengurangi ketergantungan impor sapi dengan mengawasi ketat program swasembada sapi saat ini dan ke depan.

Pendahuluan

Sampai saat ini kebutuhan daging sapi untuk konsumsi dalam negeri terus meningkat, sementara suplai dari sentra-sentra peternakan sapi terutama di Indonesia timur belum bertambah. Seperti diketahui konsumsi daging sapi dalam negeri selalu meningkat terutama pada saat bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagian pada bulan Desember.

Impor daging sapi menjadi jalan yang cepat bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan

kurangnya pasokan daging sapi dalam negeri padahal pemerintah sudah menargetkan tahun 2022 merupakan program swasembada sapi. Tetapi faktanya gagal. Sebenarnya sudah sejak lama persoalan program swasembada sapi tidak tercapai. Oleh karena itu pemerintah selalu memutuskan impor daging sapi, impor sapi bakalan (anak sapi) dan sapi indukan produktif untuk memenuhi tren peningkatan konsumsi daging sapi. Tulisan ini menganalisis permasalahan



* Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: juli.saragih@dpr.go.id.



produksi sapi dalam negeri dan kebijakan program swasembada sapi yang belum dapat memenuhi peningkatan konsumsi di dalam negeri.

Konsumsi Daging Sapi dan Produksi Dalam Negeri

Menurut data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dirilis pada tahun 2018, konsumsi daging pada masyarakat Indonesia pada 2017 baru mencapai rata-rata 1,8/ kapita/tahun kg untuk daging sapi, 7 kg/kapita/tahun daging ayam, 2,3 kg/kapita/tahun daging babi, dan 0,4 kg/kapita/tahun daging kambing. Sedangkan berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, konsumsi daging sapi pada tahun 2018 sebesar 2,50 kg/kapita/tahun, tahun 2019 naik menjadi 2,56 kg/kapita/tahun. Sementara tahun 2020, konsumsi daging kembali turun dampak dari pandemi Covid-19 menjadi 2,36 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2021 naik menjadi sebesar 2,44 kg/kapita/tahun akibat pandemi yang belum berakhir. Tahun 2022 menurut angka prognosa sapi akan kembali naik menjadi 2,62 kg/kapita/tahun. Kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional jika tingkat konsumsi sebesar 2,62 kg/kapita/tahun adalah sebesar 720,13 ribu ton. Rata-rata tingkat konsumsi daging di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata tingkat konsumsi dunia yang mencapai 6,4 kg/kapita/tahun daging sapi (satudata.pertanian.go.id, 1 Desember 2022). Jika rata-rata konsumsi daging sapi 3,0 kg/kapita/tahun maka kebutuhan daging sapi nasional tiap tahun dapat mencapai 800 ribu sampai 820

ribu ton dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta orang.

Data dari Kemenko Perekonomian per 22 Mei 2023 menjelaskan, proyeksi kebutuhan daging sapi dan kerbau tahun 2023 berjumlah 816.790 ton naik dari tahun 2022 sebesar 736.662 ton (naik 9,81%), sedangkan produksi daging sapi dan daging kerbau dalam negeri sebanyak 442.690 ton yang juga naik dari 389.668 ton di tahun 2022. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Agung Suganda menyebutkan ketergantungan impor Indonesia mencapai di atas 40%. Jumlah sapi yang dipotong rata-rata setiap tahun adalah 2,5 juta ekor di mana pada saat Idul Adha saja ternak sapi yang dipotong mencapai rata-rata per tahun sebanyak 650.000 ekor. Jika populasi ternak sapi dan kerbau di dalam negeri dapat ditingkatkan maka, pada tahun 2026 impor daging sapi dari luar negeri hanya sekitar 10% saja (Kompas, 19 Juni 2023).

Produksi daging sapi Indonesia jelas kalah bersaing dengan berbagai negara. Produsen daging sapi terbanyak di dunia tahun 2022 antara lain Amerika Serikat (28,428 juta ton), Brasil (22,817 juta ton), Republik Rakyat Tiongkok (15,707 juta ton), Uni Eropa (14,969 juta ton) dan India (9,590 juta ton). Terdapat 5 negara di dunia yang memiliki populasi sapi terbanyak di dunia tahun per Juni 2023 yakni India (307,5 juta ekor), Brasil (194,37 juta ekor), RRT (101,5 juta ekor), AS (89,27 juta ekor), dan Argentina sebanyak 53,12 juta ekor, (Kompas, 19 Juni 2023).

Impor sapi Indonesia setiap tahun umumnya dan dominan berasal dari AS, India, Australia dan Selandia Baru. Namun pemerintah Indonesia perlu melakukan diversifikasi pemasok sapi yakni dari Brasil selain pentingnya percepatan program swasembada sapi dalam negeri. Karena stok sapi di Brasil cukup banyak dan mampu mensuplai sapi ke pasar dunia sebanyak 20,62% dari total sapi di dunia. Brasil mampu mengeksport sebanyak 2,5 juta ton daging sapi ke pasar global tahun 2020 lalu, termasuk ke AS dan UE. Brasil bahkan mengalami surplus daging sapi setiap tahun mencapai hampir 10 juta ton (Kompas, 19 Juni 2023).

Kebijakan Swasembada Sapi

Impor sapi dilakukan karena adanya kegagalan dalam program swasembada sapi selama ini. Pemerintah terkesan tidak serius dalam mengelola program swasembada sapi. Menurut peneliti dari LIPI, Syahrudin, beberapa strategi dan saran kebijakan dalam rangka mewujudkan pencapaian swasembada daging sapi nasional yang harus diacu dan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan, yaitu: (1) penciptaan bibit unggul melalui *breeding* dan perbaikan genetik, (2) peningkatan populasi dan mutu genetik melalui reproduksi dan pembiakan, (3) pemenuhan pakan berkualitas sepanjang tahun berbasis bahan baku lokal, (4) pengendalian dan pengontrolan kesehatan hewan dan betina produktif, (5) pascapanen dan pengolahan untuk menciptakan margin dan nilai (*value creation*), (6) penerapan regulasi dan kebijakan pemerintah yang kondusif, serta

(7) pengembangan SDM peternak. Selain itu Syahrudin menegaskan bahwa penerapan bioteknologi reproduksi dipadukan dengan teknologi marka genetik dalam seleksi program pemuliaan sapi potong dapat mempercepat perolehan bibit unggul. Pemanfaatan bibit unggul akan meningkatkan produktivitas sekaligus populasi sapi. Implementasi iptek tersebut ke masyarakat ataupun industri peternakan, akan mempercepat pencapaian swasembada daging nasional, secara tidak langsung juga mendukung peternak kecil dan *stakeholders*. (lipi.go.id, 7 Oktober 2020).

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia akan swasembada daging sapi pada tahun 2026. Sementara itu program swasembada daging sapi tahun 2010 dan swasembada daging sapi 2014 di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono juga gagal. Ternyata produksi daging sapi lokal hanya memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan nasional. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman juga menyatakan swasembada daging sapi pada tahun 2019 dan dikembangkan dengan program SPR (Sekolah Peternak Rakyat) dan disusul dengan kebijakan Siwab (Sapi Wajib Bunting). Namun hal ini juga tidak berhasil meningkatkan jumlah sapi.

Kegagalan program swasembada daging sapi selama ini terjadi karena dalam menyusun perencanaan menggunakan data dan angka populasi yang tidak valid dan akurat. Selain itu pemerintah menggunakan asumsi yang tidak nalar seperti angka produksi daging per ekor sapi yang terlalu tinggi. Tidak disadari bahwa mekanisme pasar akan mengoreksi kesalahan yang dibuat pemerintah. Terlepas dari telaah terkait dengan

perintah Presiden Jokowi untuk dapat swasembada daging sapi tahun 2026, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah (ispi.org, 28 Oktober 2021), yakni: *Pertama*, bahwa sesungguhnya impor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan nasional bukan barang baru. Karena sejak era pemerintahan Presiden Soeharto impor daging sapi telah dilakukan. *Kedua*, penggemukan sapi bakalan eks impor adalah sebagai pendukung untuk meningkatkan jumlah sapi dalam negeri. Bukan hal yang utama. *Ketiga*, impor daging sapi yang berkualitas sebagai penyambung. Pemerintah memang sulit untuk keluar dari keterpaksaan impor daging sapi. Kegagalan program swasembada sapi yang kurang realistis, akhirnya mengorbankan biaya APBN dan terkesan hanya sebagai retorika dan jargon.

Keempat, belajar dari kenyataan yang ada dan pengalaman program di waktu lalu, sudah waktunya pemerintah harus melakukan pembenahan data dan angka, terkait dengan populasi dan produksi daging sapi yang benar. *Mark up* populasi dan produksi daging sapi dalam negeri menyebabkan terjadi kebijakan yang tidak tepat. *Kelima*, pemerintah secara konsekuen harus melakukan pencegahan pemotongan sapi betina produktif. *Law enforcement* bagi pelaku pemotongan sapi betina produktif perlu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Agar terjadi percepatan penambahan anak-anak sapi. *Keenam*, usaha penggemukan sapi eks impor harus dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha bagi peternak rakyat. Pola kemitraan Inti Plasma perlu dilakukan. Sekurang kurangnya

25% dari sapi bakalan yang diimpor oleh para feedlotter, diplasmakan kepada peternak rakyat. Selain itu perusahaan besar mempunyai kewajiban sebagai *offtaker* dan juga melakukan transfer of knowhow kepada peternak rakyat.

Ketujuh, untuk setiap volume tertentu, misalkan 25 ton importir daging sapi/kerbau, maka importir wajib membeli sapi betina produktif untuk dikembangbiakkan dan bekerj sama dengan peternak kecil untuk memeliharanya dengan pola yang disepakati bersama. Jika strategi tersebut dilaksanakan, maka persoalan ternak sapi akan dapat diselesaikan. Adanya ketimpangan antara kebutuhan dengan suplai akan teratasi dengan baik dan menjadi solusi dalam jangka panjang. Jika langkah di atas dilakukan, maka swasembada sapi optimis dapat dicapai.

Penutup

Pemerintah perlu mencari solusi adanya ketimpangan yang besar antara kebutuhan akan daging sapi dengan suplai yang selalu tidak mencukupi. Kebijakan impor daging sapi—walau merupakan cara yang kurang baik untuk ditempuh menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi ketimpangan di atas. Selain itu impor anak sapi dan sapi indukan untuk pengembang biakan juga penting ditingkatkan untuk membantu menambah jumlah ternak sapi di dalam negeri. Justru hal ini merupakan salah satu strategi yang perlu terus dilakukan.

Kebijakan swasembada sapi di masa datang perlu ditata ulang, baik masa pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan yang akan datang. Karena dengan

swasembada sapi, impor daging sapi dapat diturunkan secara perlahan. Kementerian Pertanian perlu berbenah dan mengevaluasi apa penyebab kegagalan swasembada ternak sapi dalam negeri. Sedangkan DPR RI melalui Komisi IV dan VI perlu mengawasi secara ketat program-program peningkatan ternak sapi dan membatasi impor sapi, khususnya impor daging sapi dari luar negeri serta memprioritaskan impor daging sapi yang berkualitas baik untuk dikonsumsi.

Referensi

- “Mencari Alternatif Impor Sapi Hidup”, *Kompas*, 19 Juni 2023, hal. 10.
- “Menggugat Rantai Impor Daging Sapi”, *Kompas*, 19 Juni 2023, hal. 11.
- “Oulook Komoditas Peternakan: Daging Sapi (2022)”, *satudata.pertanian.go.id*, 1 Desember 2022, <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/356>, diakses 20 Juni 2023.

“Swasembada Daging Sapi Tahun 2026”, *ispi.org*, 28 Oktober 2021, <https://pb-ispi.org/swasembada-daging-sapi-tahun-2026/>, diakses 21 Juni 2023.

“Tujuh Saran Kebijakan Wujudkan Swasembada Daging Nasional”, *lipi.go.id*, 7 Oktober 2020, <http://lipi.go.id/berita/Tujuh-Saran-Kebijakan-Wujudkan-Swasembada-Daging-Nasional/22175LIPI>, diakses 20 Juni 2023.